

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM MENCIPTAKAN KONDUSIFITAS DAERAH DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

Teddy Marliady Nurwan*¹, Adit Surya², Hadi Firmansyah³
^{1,2,3}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 10, 2025

Revised Mei 31, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

Public Policy

Implementation of Public Policy

Program Effectiveness

Social Conflict

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of social conflict management programs in creating regional conduciveness in the National Unity and Political Agency of Sumedang Regency, which is an inhibiting factor and an effort to overcome obstacles to social conflict management programs. The method used in the preparation of this research report is the Qualitative Research method. The sampling technique used is Purposive Sampling, which is a sampling technique for data sources with certain considerations. There are 4 people who are used as data sources, namely: Head of National Vigilance, General Administration, Office Administration, Letter or Recap. Meanwhile, in analyzing data, the Miles and Huberman model (sugiyono, 2017:246) is used with step steps: data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification, and triangulation, as well as data validation. Based on the results of the study, it was concluded that the effectiveness of the social conflict management program in creating regional conduciveness in the National Unity and Political Agency of Sumedang Regency has not been maximized, because there are things that affect so that it becomes an obstacle such as lack of special skills, uneven workload, suggestions and facilities have not been accommodated as a whole. To overcome various things that exist as inhibiting factors, efforts that can be made are to conduct exercises, technical guidance and comparative studies to improve the quality of human resources and improve recommendations and facilities in accordance with the set budget.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Teddy Marliady Nurwan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jl. Angkrek Situ No.19 - Sumedang
Email: teddy_marliady@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Sebagai Bangsa yang besar, Indonesia ini banyak sekali menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai dan ideologi, maupun intervensi kepentingan, baik dari dalam maupun dari luar yang dapat menimbulkan perpecahan dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh berpotensi bagi Negara kesatuan Republik Indonesia, di mana konflik menjadi fenomena yang sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Dalam Undang-Undang Tahun 2012 ini yang dimaksud Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Seperti kebanyakan, konflik tidak pernah luput dari mata dan pendengaran kita. Konflik selalu saja terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, dan bahkan dalam sistem sosial yang bernama keluarga dan pertemanan sehingga konflik telah terjadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.

Seperti kebanyakan, konflik tidak pernah luput dari mata dan pendengaran kita. Konflik selalu saja terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, dan bahkan dalam sistem sosial yang bernama keluarga dan pertemanan sehingga konflik telah terjadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Konflik sosial tidak terjadi begitu saja, karena ada faktor yang kompleks mulai dari kekuatan etnis, kelas sosial, ketidaksetaraan, kesempatan politik. Konflik secara sendiri sifatnya sangat dinamis. Sewaktu-waktu dapat memicu konflik yang kian meluas, tetapi juga dapat berhenti seketika, tergantung pada intensitas kekerasan, tipe kekerasan, dan level aktivitas politik yang ada di dalam konteks wilayah konflik.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bidang Kewaspadaan Nasional membuat program yang bernama program penanganan konflik untuk menciptakan kondusifitas di Kabupaten Sumedang. Dengan tujuan sasaran mencapai yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi.
- 2) Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik.
- 4) Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan.
- 5) Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah.
- 6) Membangun hubungan yang harmonis dan manusiawi di antara pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, mandiri dan berakhlak mulia.

Dalam target kinerja “Cipta Kondisi Kondusif” tahun 2021 sebesar 100% dan realisasinya mengacu kepada Nilai Cipta Kondisi Kondusif Provinsi Jawa Barat yang mana realisasi kinerja sebesar 100%, dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2020 capaian kinerja Cipta Kondisi Kondusif 100% dan tahun 2021 adalah 100%. Dalam Renstra 2018-2023 “Cipta Kondisi Kondusif” adalah 100%, dan realisasi dari target 100% tercapai di Tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan observasi sementara di Badan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kabupaten Sumedang khususnya di Bidang Kewaspadaan Nasional, dimana ditemukan berbagai indikasi permasalahan, antara lain.

1. Kurangnya efektivitas implementasi program meskipun program penanganan konflik telah dirancang dengan baik, sering kali implementasinya di lapangan tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak yang terlibat, keterbatasan sumber daya, atau birokrasi yang berbelit. Akibatnya, masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran program merasa bahwa dampak yang diharapkan tidak tercapai secara optimal.
2. Masih Terjadinya Konflik Berulang program yang telah dijalankan belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan konflik, sehingga konflik yang serupa masih sering muncul di berbagai wilayah. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum cukup efektif dalam menciptakan solusi jangka panjang.
3. Minimnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dengan rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian konflik menghambat keberlanjutan program. Sosialisasi dan edukasi yang belum maksimal menyebabkan kurangnya pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan indikasi diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM MENCIPTAKAN KONDUSIFITAS DAERAH DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG”**

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik dimana penelitiannya dilakukan dalam kondisi alamiah dan hasilnya menekankan pada makna daripada generalisasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan fenomena berdasarkan analisis data-data deskriptif atau alamiah. Menurut Sugiyono (Saputra dan Widiyarta, 2021:202) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode atau pendekatan yang bertujuan meneliti pada kondisi objek alamiah.

Selanjutnya mengenai penelitian kualitatif, Sugiyono (2021:18) mengemukakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian berdasarkan pada filsafat positivise, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisi.”

Adapun karakteristik Bogdan dan Biklen (Abu Bakar, 2021:11) menyatakan bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key instrument* (Penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah secara langsung kepada sumber data dan peneliti berposisi sebagai instrumen kunci).
- 2) *Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number.* (Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka).
- 3) *Qualitative research are concerned whit proces rather than simply whit outcomes or products* (Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome).
- 4) *Qualitative research tend to analyze their data inductively* (Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif).
- 5) *“Meaning” is of essential to the qualitative approach* (Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang dapat diamati).

Selain itu, dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) macam sumber yang digunakan sebagai berikut:

1. Data primer: data yang diperoleh secara langsung dari para informan setelah memberikan jawaban atau tanggapan melalui Teknik wawancara mendalam.
2. Data sekunder: data yang diperoleh secara tiding langsung, yang bersumber dari perpustakaan, dokumen-dokumen dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan mampu mengungkap fenomena yang dikaji dengan mendeskripsikan dan menyimpulkan data secara

3. RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas Program Penanganan Konflik Sosial Dalam Menciptakan Kondusifitas Daerah Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang

Efektivitas seringkali disebut sebagai acuan baik atau tidaknya suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh suatu instansi atau yang lainnya. Efektivitas sendiri merupakan suatu upaya untuk menilai keberhasilan dari program atau kebijakan itu sendiri, menurut Pekei (Setiawan dan Nugraha, 2023:685) mendefinisikan efektivitas bahwa: “Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi.”

Efektivitas suatu program dibutuhkan untuk menjadi bahan acuan agar mengetahui tingkat keberhasilan dari program tersebut, menurut Subagyo (Najidah, 2019:19) mendefinisikan efektivitas program bahwa: “Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program dan pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran menentukan efektivitas suatu program.”

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari dalam efektivitas program, peneliti menggunakan alat ukur dalam mengukur efektivitas program Menurut Champbell (Dalam Bastaman 2020:176), mengemukakan dimensi untuk mengukur efektivitas program, diantaranya sebagai berikut:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil Efektivitas Program Penanganan Konflik Sosial Dalam Menciptakan Kondusifitas Daerah Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian Efektivitas Program Penanganan Konflik Sosial Dalam Menciptakan Kondusifitas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang

Dimensi	Indikator	Kesimpulan
Keberhasilan program	a. Pencapaian Tujuan dan Sasaran	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan membentuk tim PUSKOMIN (pusat Komunikasi Informasi),pencapaian dan tujuan dalam program ini selalu menerima laporan setiap hari dan setiap bulan bertujuan untuk mendapatkan laporan pencapaian dan terealisasinya IKU tingkat cipta,kondisi,kondusif.
	b. Peningkatan Kapasitas Target	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan adanya PUSKOMIN (Pusat komunikasi Informasi) yang dimana laporannya sudah berbentuk data sehingga laporannya itu bisa tiap hari atau minggu contohnya peningkatan kapasitas target program ini bisa dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu yang di mana pada tahun 2024 itu sebesar 84,61% dan pihak badan ini juga menggunkan cara lain dengan aplikasi WA untuk meningkatkan kapasitas target program ini
	c. Jangka Panjang	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program ini di khususkan untuk jangka panjang dalam mencegah konflik berkepanjangan dengan keberhasilan program ini dapat di nilai dari konsisten perencanaan,implementasi,dan evaluasi program ini yang sudah ada dari dulu.
Keberhasilan sasaran	a. Sistem Monitoring	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring untuk program ini dilakukan setiap hari dengan menerima laporan dari kecamatan,untuk memonitoring pelaksanaan program ini,bidang Kewapadaan Dini selalu berkolaborasi bersama instansi vertikal di bagian kemanan yaitu dengan polri seperti memonitoring dalam penanganan kewaspadaan dini contoh ATHG pilkada.
	b. Kecepatan Respon terhadap Insiden	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan membentuk tim antisipasi cegah dini,tangkal dini,serta deteksi dini ketika ada laporan insiden sedang berjalan maka tim kewaspadaan dini langsung terjun kelapangan untuk mencegah timbulnya konflik berkepanjangan.
	c. Efektivitas Biaya	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program ini mempunyai anggaran tersendiriya sehingga masih bisa berjalan dengan baik baik meski sebagian belum bisa mengcover keberlangsungan tupoksi
Kepuasan terhadap program	a. Tingkat Kepuasan	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk sejauh ini dalam menjalankan program ini belum ada keluhan sama sekali dri masyarakat ataupun dari pihak terkait karena ketika ada insiden pihak WASNAS langsung segera bertindak secepat mungkin meski sebagian masih ada yang merasa bahwa pelayanan di BAKESBANGPOL ini masih belum cukup baik.
	b. Kualitas Program	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program ini yang dsimana telah ditetapkan sesuai target oleh RENSTRA dan RENJA sehingga program ini sudah berjalan dangan baik tanpa ada kendala

		jadi sangat memungkinkan program ini mempunyai kualitas yang baik dalam menciptakan kondusifitas.
	c. Manfaat Program	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program ini di buat untuk menciptakan kondusifitas bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan dampak yang positif untuk lingkungan sekitarnya dan sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat daerah Sumedang.
Tingkat input dan output	a. Layanan yang di hasilkan	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang di berikan BAKESBANGPOL ini sangat memenuhi standar opsional jika kalau tidak sesuai SOP makan pihak BAKESBANGPOL kan berkoordinasi dengan TNI dan POLRI untuk menciptakan kondusifitas Daerah Sumedang.
	b. Jumlah Laporan yang di hasilkan	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Setiap hari dan bulan bidang WASNAS selalu menerima laporan dari kecamatan dan melakukan tinjauan secara berkala dalam proses pembuatan laporan sehingga laporan yang dihasilkan sudah efektif dan efisien mungkin.
	c. Mengantur alur kerja	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Ada beberapa alur kerja untuk mencapai tenggat waktu yang telah ditetapkan yaitu: 1. Dengan membuat jadwal alur kerja yang teratur 2. Mengimplementasikan rencana supaya bisa mencapai tujuan sesuai tupoksinya 3. Alur kerja di bagi menjadi perwilayah supaya kinerja untuk program ini cepat waktu
Pencapaian tujuan menyeluruh	a. Mengidentifikasi tujuan akhir	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dengan mengikuti aturan kebijakan dari pimpinan yang di mana sudah ada susunan yang meliputi sebagai berikut: 1. Merumuskan 2. Menyusun 3. Melaksanakan 4. Mengevaluasi program
	b. Pengumpulan dan Pemantauan Data	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cara mengumpulkan dan pemantauan ada yang secara langsung atau dengan aplikasi, untuk secara langsung dengan melibatkan tim terpadu sesuai tupoksu bidang yang di bentuk oleh bupati, sekda maupun kepala badan sedangkan dengan aplikasi bisa memakai PUSKOMIN untuk mengetahui laporan secara online.
	c. Evaluasi hasil program	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengevaluasi program ini dengan melibatkan pimpinan, tim kewaspadaan dini dan tim terpadu penanganan konflik dengan mengumpulkan laporan dari setiap kecamatan agar permasalahan ini terealisasikan dan tidak terjadi miss komunikasi.

Sumber: hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di BAKESBANGPOL Kabupaten Sumedang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan efektivitas program penanganan konflik sosial yang diurai kedalam beberapa dimensi dari efektivitas program sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tentang ketepatan sasaran program yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu pencapaian tujuan dan sasaran, peningkatan kapasitas target, dan jangka panjang, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan program pada program penanganan konflik sosial sudah cukup maksimal. Dalam hasil wawancara dan observasi menyebutkan bahwa pembentukan tim PUSKOMIN (Pusat Komunikasi Informasi) telah berhasil dalam mencapai tujuan program dengan menerima laporan harian dan bulanan yang bertujuan untuk memantau pencapaian dan realisasi IKU tingkat cipta, kondisi, dan kondusif. Selain itu, badan ini juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk meningkatkan kapasitas

target program. Program ini dirancang untuk jangka panjang guna mencegah konflik berkepanjangan, dengan keberhasilan yang dinilai dari konsistensi perencanaan, implementasi, dan evaluasi program yang telah berjalan. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Helmet (2012) mengemukakan bahwa “Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sudah kita tentukan”. Berdasarkan kesimpulan dan juga teori di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan program yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang sudah cukup maksimal.

2. Keberhasilan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tentang ketepatan sasaran program yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu sistem monitoring, kecepatan respon terhadap insiden, dan efektivitas biaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan sasaran pada program penanganan konflik sosial sudah cukup maksimal. Dalam hasil wawancara dan observasi menyebutkan bahwa bidang Kewaspadaan Dini selalu berkolaborasi dengan instansi vertikal di bagian keamanan, seperti Polri, dalam memonitoring kewaspadaan dini, contohnya dalam penanganan ATHG pilkada. Pembentukan tim antisipasi cegah dini, tangkal dini, serta deteksi dini memungkinkan tim kewaspadaan dini untuk segera terjun ke lapangan ketika ada laporan insiden, guna mencegah timbulnya konflik berkepanjangan. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Prihartono (2012) mengemukakan bahwa: “efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan.” Berdasarkan kesimpulan dan juga teori di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan sasaran yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang sudah cukup maksimal.

3. Kepuasan Terhadap Program

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tentang ketepatan sasaran program yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu tingkat kepuasan, kualitas program, dan manfaat program, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan terhadap program pada program penanganan konflik sosial sudah cukup baik. Dalam hasil wawancara dan observasi menyebutkan bahwa sejauh ini program ini telah berjalan dengan baik tanpa ada keluhan dari masyarakat atau pihak terkait. Ketika terjadi insiden, pihak WASNAS segera bertindak cepat, program ini telah ditetapkan sesuai target oleh RENSTRA dan RENJA, sehingga berjalan tanpa kendala dan memiliki kualitas yang baik dalam menciptakan kondusifitas. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat, memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat di daerah Sumedang. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Oliver dalam Supranto (2017) mengemukakan bahwa “Dalam pelayanannya kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan sangat puas harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan memberi komentar yang baik.” Berdasarkan kesimpulan dan juga teori di atas dapat dikatakan bahwa kepuasan terhadap program yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang sudah cukup baik.

4. Tingkat input dan output

Berdasarkan hasil wawancarakan tentang ketepatan sasaran program yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu layanan yang dihasilkan, jumlah laporan yang dihasilkan, mengatur alur kerja, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat input dan output dalam program penanganan konflik sosial sudah cukup maksimal. Dalam hasil wawancara dan observasi menyebutkan bahwa jika terdapat ketidaksesuaian dengan SOP, pihak BAKESBANGPOL akan berkoordinasi dengan TNI dan POLRI untuk menciptakan kondisi yang kondusif di daerah Sumedang. Setiap hari dan bulan, bidang WASNAS selalu menerima laporan dari kecamatan dan melakukan tinjauan berkala dalam proses pembuatan laporan, sehingga laporan yang dihasilkan efektif dan efisien. Selain itu, terdapat beberapa alur kerja untuk mencapai tenggat waktu yang telah ditetapkan, yaitu dengan membuat jadwal alur kerja yang teratur, mengimplementasikan rencana agar mencapai tujuan sesuai tupoksinya, dan membagi alur kerja per wilayah untuk mempercepat kinerja program ini. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Beni (2016) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, prosedur dari suatu organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi pada sektor publik, sehingga dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.” Selanjutnya pembahasan mengenai tingkat input dan output menurut Campbell (Dalam

Momonto 2022) mengemukakan bahwa “Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.” Berdasarkan kesimpulan dan juga teori di atas dapat dikatakan bahwa tingkat input dan output yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang sudah cukup maksimal.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Berdasarkan hasil wawancara tentang ketepatan sasaran program yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu mengidentifikasi tujuan akhir, pengumpulan dan pemantauan data, dan evaluasi hasil program, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian tujuan menyeluruh output dalam program penanganan konflik sosial sudah cukup maksimal. Dalam hasil wawancara dan observasi menyebutkan bahwa dengan mengikuti kebijakan dari pimpinan, program ini dirancang melalui empat tahap utama: merumuskan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Pengumpulan dan pemantauan dilakukan baik secara langsung maupun melalui aplikasi. Pemantauan langsung melibatkan tim terpadu sesuai tupoksi bidang yang dibentuk oleh bupati, sekda, atau kepala badan, sedangkan pemantauan melalui aplikasi dapat dilakukan menggunakan PUSKOMIN untuk laporan online. Evaluasi program melibatkan pimpinan, tim kewaspadaan dini, dan tim terpadu penanganan konflik dengan mengumpulkan laporan dari setiap kecamatan untuk memastikan bahwa permasalahan terealisasi dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Jamaluddin (2011) mengemukakan bahwa: “Pencapaian tujuan telah ditetapkan itu sangat tergantung sejauhmana organisasi memiliki personil yang berkinerja tinggi dan unggul.” Selanjutnya pembahasan mengenai pencapaian tujuan menyeluruh menurut Kotler, Rosmaniar (2012:4) mengemukakan bahwa “Mendefinisikan efektivitas sebagai tujuan yang diinginkan atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Organisasi yang besar maupun yang kecil memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin merealisasi seluruh tujuan-tujuannya secara efektif. Maksudnya, bahwa tujuan yang efektif itu adalah tujuan meralisir program yang telah ditetapkan dan berhasil berdasarkan sasaran yang juga telah ditetapkan.” Berdasarkan kesimpulan dan juga teori di atas dapat dikatakan bahwa tingkat input dan output yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang sudah cukup maksimal.

4. CONCLUSION

Pengelolaan informasi yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah elemen penting dalam pelaksanaan program. Kurangnya pegawai yang berpengalaman dalam aspek ini menyebabkan informasi yang dikumpulkan dan disampaikan tidak selalu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang tidak efektif.

Koordinasi yang baik antar bagian dalam BAKESBANGPOL sangat penting untuk memastikan bahwa semua departemen bekerja secara sinkron. Kurangnya koordinasi ini menghambat aliran informasi yang tepat dan efisien, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tidak selalu tersedia tepat waktu. Akibatnya, langkah-langkah yang diambil mungkin tidak optimal atau terlambat.

Partisipasi masyarakat adalah kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, ada risiko bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan efektif atau diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat mengurangi keberhasilan program dalam menciptakan kondusifitas daerah.

REFERENCES

- Akadun. (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Andriani, Y. (2021). *Efektivitas Program Pemutakhiran Data Melalui Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Di Kabupaten Bengkulu Selatan*. Skripsi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Anggara, S. (2018). *Ekologi Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arraniri, Iqbal., Firmansyah, H., Wiliana, E., dkk. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cirebon: Insania.
- Bastaman, K., Nawawi, A., & Taharudin, T. (2020). Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- bubakar, Rifai. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga. Diakses pada 19 Juli 2024. [PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://www.uin-suka.ac.id/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf) (uin-suka.ac.id)
- Handoyono Eko, 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

- Indradi, S. S. (2016). *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Jakarta Timur: Intrans Publishing.
- Jibril, A. (2017). Efektivitas Program PERPUSERU Di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Universitas Airlangga*. Diakses 08 April 2024: [download-fullpapers-In2adb377f70full.pdf](https://doi.org/10.24127/jurnal.unair.ac.id) (unair.ac.id)
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mamonto, S. I. P., Rachman, I., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu). *Governance*, 2(1).
- Maneggio: *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* (umsu.ac.id)
- Mufiz, A. (2016). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Najidah. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Volume 8 No 2. Diakses 14 April 2024: EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG | Najidah | *Journal of Public Policy and Management Review* (undip.ac.id)
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmawati Reni. (2023). *Efektivitas Program SIPPUJAN Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang*. Skripsi. Sumedang: Universitas Sebelas April Sumedang.
- Rahmawati Sururama, R. A. (2020). *Buku Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendikia Press.
- Rivai, A. (2021). Pengaruh Pengawasan, Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Ilmu Magister Manajemen* Volume 4 No 1. Diakses 15 April 2024. Pengaruh Pengawasan, Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru | Rivai
- Rizky Chintyanisa, S. W. (2024). Efektivitas Pendayagunaan Pemberian Modal Usaha Untuk Meningkatkan Produktivitas Mustahik BAZNAZ Provinsi Kalimantan Timur. Volume 3 No 1. Diakses 11 April 2024. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/14015>
- Saputra, DP., Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Volume 7 No 2. Diakses 18 Juli 2024. <https://scholar.archive.org/work/5pfeuph3rzb5nkqmwjhrqlhwh4/access/wayback/https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/download/4497/4017>
- Setiawan, E. (2018). Budaya Organisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Volume 2 No 1. Diakses 14 April 2024: <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.20099>
- Setiawan, Edi., Amala R., Dadan SN. (2023). Efektivitas Organisasi Terminal Tipe C Wado Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Volume 10 No 3. Diakses 13 April 2024: <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/12451/pdf>
- Silalahi, U. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sipayung, M. E. (2016). Konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari: Kajian sosiologi sastra. *Sintesis*, 10(1), 22-34.
- Subianto Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Briliant.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (2006). Konflik sosial dan alternatif pemecahannya. *Antropologi Indonesia*, 30(2).
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transportasi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.